

**ANALISIS PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI  
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR TIMUR (JLLT)  
KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memproleh Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**ROJIH SYADEWA**

**NIT 20293420**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

Land procurement is a series of activities to provide land by means of compensation aimed at obtaining public interests. A ring road is a road that circles a city with the aim of reducing traffic flow from the city center, one of which is the construction of the East Outer Ring Road (JLLT) in the city of Surabaya. The increase in activity in the city of Surabaya has resulted in an increase in demand for transportation accessibility, so the Surabaya City Government has responded to these demands by constructing the East Outer Ring Road (JLLT). The construction of the new access road is considered to have an impact and cause changes to several things in the surrounding area, one of which is land value. Therefore, this research was conducted to determine the magnitude of the influence caused by the construction of JLLT. The area that is the subject of this research consists of 13 sub-districts from 6 sub-districts.

The aim of the research is to determine the progress and problems in the implementation of land acquisition for the construction of the JLLT in Surabaya city and the solutions that can be provided. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews and document study.

The results of the research show that there are obstacles in land acquisition activities in the city of Surabaya, namely: (1) Lack of thoroughness in progressing budget funds resulting in limited budgets from agencies, (2) Indiscipline regarding the acceleration of construction development schedules even though land acquisition is not yet 100%, (3) There are disputes Ownership of Land Rights, (4) Affected assets belonging to TNI agencies, difficulty in compensation in the form of vacant land, (5) Indiscipline regarding land acquisition clearance. The solution to this problem is (1) holding a coordination meeting with the State Asset Management Institute and Government Cooperation with Business Entities (KPBU), (2) setting a definite schedule, (3) conducting mediation and guidance to the task force (4) ) the land procurement committee wrote a letter to the TNI leadership to come up with a joint solution, (5) guidance before going to the location to the land procurement committee so that the committee knows everything that is needed and knows the sequence of locations that will be released

Keyword: Land acquisition, East Outer Ring Road (JLLT), and Solutions

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>3</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>7</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>9</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>10</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>11</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>12</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Keaslian Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Kerangka Teoritis .....	22
B. Kerangka pemikiran .....	26
C. Pertanyaan penelitian lanjutan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31
E. Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data .....	36
F. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Kota Surabaya .....	39
B. Lokasi Pembangunan JLLT .....	43
C. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.....	43

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A.    Mekanisme Pengadaan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT).....	45
B.    Progres Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan JLLT .....	55
C.    Permasalahan pada pelaksanaan Pengadaan Tanah JLLT .....	59
<b>BAB VI SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN JALAN LINGKAR LUAR TIMUR (JLLT) DI KOTA SURABAYA.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A.    Kesimpulan.....	68
B.    Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dalam kerangka keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu modal yang penting untuk Pembangunan nasional adalah tanah, namun ketersediaan tanah yang terbatas sehingga mendorong perolehan tanah dilakukan dengan pengadaan tanah. Menurut Bagir Manan (Kompas, 20 Juni 2005), Kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak mensyaratkan hal tertentu. Misalnya, pembuatan jembatan, yang orang bisa melewatinya tanpa harus membayar, berbeda dengan jika masuk hotel yang harus membayar. Definisi kepentingan umum secara luas dalam Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Bersama dari rakyat.

Permasalahan besar transportasi di kota Surabaya yang sampai saat ini belum diselesaikan secara tuntas antara lain, belum terbentuknya sistem jaringan jalan yang mampu mendistribusikan secara penuh untuk kebutuhan perjalanan warga kota Surabaya, belum selesainya pembuatan sistem jaringan jalan yang ada, mengakibatkan peningkatan pada ruas-ruas jalan tertentu menjadi semakin berat, dan kemacetan lalu lintas yang semakin padat. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak pada penggunaan jalan karena mengakibatkan tingginya biaya perjalanan, pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu, dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas.

Untuk memprioritaskan Pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah harus menyediakan lahan yang relatif dan cukup luas dari Masyarakat. Sri Yunanto (2016) menyatakan pengadaan tanah adalah proses pengambilalihan hak atas tanah oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan wajib memberikan ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah. Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Arti dari kepentingan umum maka perlunya untuk menyeimbangkan kepentingan Masyarakat, dan harus memasukan pentingnya para korban pembebasan tanah, sehingga menjadi dua pertimbangan penting yaitu kepentingan antara pengguna tanah dan pentingnya korban pembebasan tanah dalam situasi pemerintah tertentu dalam hal ini pemilik tanah yang terkena pembebasan. Hal ini berlaku pada pelaksanaan Pembangunan nasional, termasuk berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan lahan yang sangat luas.

Dikutip dari Kompas.com salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2018, yaitu membesarkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar global. Pada saat Era Pemerintah Joko Widodo saat ini menggenjot Pembangunan sejumlah infrastruktur, salah satunya merupakan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya. Hal ini sangat penting dalam memfasilitasi mobilisasi Masyarakat di kota Surabaya untuk berbisnis dan bekerja untuk mempermudah mobilisasi Masyarakat di kota Surabaya dalam berusaha dan bekerja Terhadap proyek infrastruktur pada Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat secara drastis sehingga membutuhkan mobilitas yang mencukupi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya update terakhir pada tahun sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mencapai 41.149.974 juta jiwa, sedangkan penduduk kota Surabaya sudah mencapai 3.000.076 juta jiwa.

Jalan Lingkar merupakan jalan yang melingkari sebuah kota yang umumnya jalan lingkar berguna agar mengurangi arus lalu lintas dari pusat kota salah satunya pada Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di kota Surabaya. Putu Rudy Setiawan (2022) menyebut sejak awal JLLT dibangun untuk memecah konsentrasi kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya tidak melulu lewat jalur Tengah, namun, para pakar mewanti-wanti betul agar nasib JLLT nanti tidak seperti jalan lain yang kini tingkat kejenuhannya sudah tinggi dan kinerjanya juga sudah turun. Pada masa sekarang ini cukup sulit untuk melaksanakan Pembangunan demi kesejahteraan bangsa untuk kepentingan umum, tetapi di sisi lain tanah negara yang tersedia semakin terbatas karena tanah yang ada sudah banyak dikuasai oleh masyarakat dengan suatu hak.

Banyak faktor dan permasalahan dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah, baik secara umum, maupun khusus. penetapan lokasi pembangunan pada tahun 2015, sehingga terdapat kendala yang sangat cukup kompleks dalam hal ini jatah penetapan lokasi dari Pemprov sudah habis mulai dari 2022, sehingga perlu adanya permohonan penetapan lokasi baru. Permasalahan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu muncul pada yang terkait penguasaan tanah. M Erry (2017) mengatakan selain permasalahan harga ganti rugi tanah, pemerintah tidak peduli dengan warga yang bagian rumahnya terkena separuh untuk kepentingan proyek jalan tersebut.

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur kota Surabaya pada perencanaannya akan melewati 5 Kecamatan 9 kelurahan dengan total mencapai Panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun kontuksi jalan dari tahun 2015-2022 berkisar 1.117 meter di dua daerah, Kenjeran dan Sukolilo. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk JLLT telah diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diperpanjang pada tahun 2017 serta dilakukan pembaharuan pada tahun 2018, sehingga dilakukan permohonan penetapan lokasi atas tanah sisa yang belum dibebaskan.

Gambaran umum lahan yang terkena rencana Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya berupa tambak, lahan kosong dan pemukiman. Peranan sarana prasarana jalan yang memadai maka itu pemerintah kota Surabaya merencanakan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti aspek progress dan masalah yang terdapat pada pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur kota Surabaya, kemudian berupaya memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar kota Surabaya. Maka dengan ini penulis mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Progres, Permasalahan dan Solusi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya”

## **B. Rumusan Masalah**

Kegiatan untuk keberhasilan untuk pengadaan tanah tidak hanya dilihat dari satu sisi saja namun demikian perlu untuk memperhatikan terhadap hak warga Masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak Pembangunan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu ada permasalahan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terkait penguasaan tanah. Permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan. Masalah besar transportasi kota Surabaya yang sampai saat ini belum cukup teratasi secara tuntas maka itu pemerintah kota Surabaya secara sungguh-sungguh mencari alternatif pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di kota Surabaya dilaksanakan?
2. Bagaimana progres pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di kota Surabaya?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses pengadaan tanah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui permasalahan dan solusinya yang terdapat pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur kota Surabaya
- b. Mengetahui mekanisme pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur
- c. Mengetahui progres pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di kota Surabaya

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Ilmiah

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penelitian terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga dapat dijadikan pembelajaran

#### b. Manfaat Sosial

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat Kota Surabaya agar mampu beradaptasi untuk menerima perbedaan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan pengadaan tanah

#### c. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan bagi Lembaga pemerintah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan lokasi pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Progres, Permasalahan dan Solusi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya ini merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian tersebut berfungsi sebagai rujukan atau pedoman dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga menjadi inovasi yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Jenis-Judul/ Peneliti	Metode/Deskripsi	Hasil
1	Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho (2021)	<b>Skripsi -</b> Mekanisme penyelesaian hambatan pengadaan tanah jalan lingkaran luar barat Surabaya di kantor badan pertanahan nasional kota Surabaya II	Empiris/ Penelitian ini difokuskan untuk menemukan solusi untuk berbagai hambatan terkait pembangunan, perencanaan, pengelolaan ekonomi, dan pelibatan masyarakat yang optimal.	Pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan apa yang diantisipasi berdasarkan persyaratan hukum dan penilaian kelayakan pembangunan JLLB
2	Ni Nyoman Adi Astiti (2020)	<b>Jurnal -</b> problematika dan solusi pada pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Yogyakarta Internasional Airport	Kualitatif/ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penelantaran hak guna bangunan	Pada penelitian tersebut ditemukan salah satu permasalahan terkait pembayaran uang ganti kerugian dan solusi yang ditawarkan yaitu pemberian informasi-informasi penting terkait dengan pengadaan tanah
3	Suraji (2022)	Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)	Kualitatif/ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)	Hasil yang didapatkan yaitu dampak sosial di proyek pembangunan. Rekomendasi terkait permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial tersebut yaitu meningkatkan harga ganti rugi atas lahan atau tanah untuk menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik,
4	Mohammad Paurindra Ekasetya (2015)	<b>Skripsi -</b> Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (studi analisis pada pembangunan jalan tol trans Jawa di kabupaten brebes)	deskriptif-kualitatif/ bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Pembangunan jalan	Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 terutama dalam pemberian ganti rugi
5	Novita Cahya Kusuma (2021)	<b>Skripsi -</b> pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkaran wates kabupaten kulon progo propinsi daerah istimewa Yogyakarta	Kualitatif/ Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkaran Wates dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkaran Wates dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan dan penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penilaian, musyawarah kemudian dilanjutkan dengan putusan panitia pengadaan

Sumber : Analisis Oleh Peneliti, 2024

Penelitian yang akan saya lakukan ini dikembangkan berdasarkan studi literatur dari penelitian terdahulu yang akan disempurnakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Fokus dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui analisa dan mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan yang belum selesai dilaksanakan penetapan lokasi
2. Lokasi penelitian yang mengkaji mengenai Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT) Kota Surabaya yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan JLLT Kota Surabaya belum berjalan sesuai dengan mekanisme. Pihak instansi yang membutuhkan tanah belum menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan. Pada tahapan pelaksanaan banyak masalah yang menghambat pada tahap ini, yaitu masih banyak kelurahan yang belum dibebaskan, progres pada pengerjaan tahap ini baru berjalan pada 9 kelurahan kelurahan dari 13 kelurahan. Pada tahapan penyerahan hasil baru saja 190 bidang tanah dari total ada 1.537 bidang.
2. Progres pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur di Kota Surabaya yang targetnya adalah 1.537 bidang dengan total luas tanah 923.056 m<sup>2</sup>. Namun, total progres yang sudah selesai baru saja tercapai sebanyak 190 bidang dengan total luas 144.642 m<sup>2</sup>. Dengan persentasi hanya mencapai 12.36 % dari 100 %.
3. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu (1) Kurang teliti melakukan progres anggaran dana sehingga terbatasnya anggaran dari instansi, (2) Ketidakdisiplinan mengenai percepatan jadwal pembangunan konstruksi padahal pembebasan tanah belum 100%, (3) Terdapat sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah, (4) Terkenanya aset milik Instansi TNI, sulitnya ganti rugi berupa tanah kosong, (5) Ketidakdisiplinan mengenai pembebasan pengadaan tanah karena pembebasan yang terpotong-potong dari setiap kelurahan.  
Solusi alternatif yang bisa dilakukan yaitu (1) Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang membutuhkan tanah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), (2) pengaturan jadwal yang sudah pasti, (3) melakukan mediasi dan bimbingan kepada satuan tugas (4) pelaksana pengadaan tanah melakukan penyuratan surat keluar kepada pimpinan TNI untuk melakukan solusi bersama, sehingga harus

memiliki kecerdasan dan berpengalaman, (5) pembimbingan sebelum turun ke lokasi kepada pelaksana pengadaan tanah agar pelaksana mengetahui semua yang diperlukan dan mengetahui lokasi yang berurut yang akan di bebaskan

**B. Saran**

1. Pada pelaksanaan harus lebih tertib dengan mekanisme pengadaan tanah
2. Jika dana tidak mencukupi membuat berita acara tidak sesuai berdasarkan tahapan ke tahapan lainnya
3. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah harus dilakukan dengan matang dan melibatkan instansi-instansi Pemerintah yang membidangi proyek pengadaan tanah dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan agar tidak banyak terjadinya hambatan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, Hardianti & Salle. 2017. 'Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum', Volume 12. Nomor 2.
- Lubis, Muhammad Fitra. 2023. 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Unruk Pembangunan Jalan Tol Becakayu Di Atas Wilayah Pengairan Sungai Kalimalang'.
- Harjanti, wiwik. 2011. 'Pengaruh perkembangan konsep kepentingan umum terhadap pelaksanaan Pembangunan di Indonesia'.
- Kusumaningrum, Ratih. 2022. 'Prosedur Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I'.
- Maulana, Ariq. 2023. 'Analisis Perubahan Kondisi Penghidupan Masyarakat Yang Berhak Pasca Pengadaan Tanah Bendungan Ciawi Kabupaten Bogor'.
- Putro Pambudi, Rostiko. 2020. 'Evaluasi Kualitas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Jalur Kereta Bandara Adi Soemarno-Stasiun Solo Balapan'
- Siti aisyah, Abdul Juli Andi Gani, M.R. Khairul Muluk. 2012. 'Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya', vol. 15, No. 3.
- Subekti, Rahayu SH, MHum. 2016. 'Kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum', *Jurnal Hukum Kebijakan Ganti Kerugian*, vol. 5, No. 2.
- Suterdi, Adrian. 2006. 'Implementasi Prinsip Kpentingan Umum dalam Pengadaan tanah Untuk Pembangunan',
- Sudirman, Senthot, Theresia Suprianti, Dian aries Mujiburrohman.. 2015. 'Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: Perkembangan, Permasalahan Dan Upaya Penyelesaiannya'
- Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Nomor 195/KEP-35.10/VIII/2020. Tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 144/KEP-35.15/VIII/2020 Tanggal 3 Maret 2020. Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 7 tentang Satuan Tugas A dan B

## **Web**

Antoro, Tri. 2020. ‘Ini Cara PUPR Atasi Kekurangan Dana Pembangunan Infrastruktur’. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/467090/ini-cara-pupr-atasi-kekurangan-dana-pembangunan-infrastruktur>

<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/467090/ini-cara-pupr-atasi-kekurangan-dana-pembangunan-infrastruktur>

Badan Pusat Statistik kota Surabaya. 2023 <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2023/02/28/219438e973b16c7c80f11868/kota-surabaya-dalam-angka-2023.html>

Damang. 2011. ‘Asas-asas Pengadaan Tanah’. <http://www.damang.web.id/2011/12/asas-asas-pengadaan-tanah.html>

Ginjar, Dhimas. 2022. ‘Menanti penuntasan proyek jalan lingkaran luar barat dan timur Surabaya’, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01421526/menanti-penuntasan-proyek-jalan-lingkar-luar-barat-dan-timur-surabaya>

Jajeli, Rois. 2017. ‘Tak puas ganti rugi JLLT, warga mengadu ke gardu keadilan sosial’, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3639989/tak-puas-ganti-rugi-jllt-warga-mengadu-ke-gardu-keadilan-sosial>

Kuwando, F.J. 2018. 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur>

Pemerintah kota Surabaya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, sosial-ekonomi. <https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya,%20sosial-ekonomi>